

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum dalam tindak pidana siber yang berkembang saat ini; 2) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber; 3) untuk menemukan dan merumuskan konstruksi *rasio legis* pengaturan ke depan penguatan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia. Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah penegakan hukum dalam tindak pidana siber yang berkembang saat ini?; 2) Apa urgensi penguatan pengaturan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber? 3) Bagaimana konstruksi *rasio legis* pengaturan ke depan penguatan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia?. Metode penelitian adalah metode penelitian Yuridis Normatif (*legal research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Penegakan hukum tindak pidana siber belum terlaksana secara maksimal, disebabkan penyidik kepolisian belum mampu melakukan penindakan berkaitan dengan kejahatan siber global seperti *phising*, *malware*, serangan *ransomware*, dan jenis kejahatan siber tersebut tidak masuk kedalam kejahatan siber sebagaimana UU ITE; 2) Urgensi penguatan pengaturan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber sangat penting untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi, dikarenakan kejahatan siber perlu ditangani lebih cepat, akurat, dan tuntas guna melindungi kepentingan nasional; 3) Konstruksi *rasio legis* terhadap penguatan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia didasarkan pada kebutuhan hukum yang adaptif terhadap dinamika kejahatan di ruang siber yang berkembang sangat cepat dan kompleks. Oleh karena itu regulasi ke depan harus dibangun dengan paradigma hukum yang responsif, jelas, tegas, dan komprehensif mengenai kewenangan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia, serta didukung oleh infrastruktur kelembagaan dan teknologi.

Kata Kunci: *Rasio Legis*, Penyidik, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Penegakan Hukum, Kejahatan Siber.

ABSTRACT

This research aims to: 1) study and analyze law enforcement in cybercrime that is currently developing; 2) examine and analyze the regulation of investigator authority in the enforcement of cybercrime laws; 3) find and formulate the construction of the ratio of legis regulation in the future to strengthen the authority of investigators in the enforcement of cybercrime laws in Indonesia. The formulation of the problems in this study is: 1) How is law enforcement in cybercrime currently developing?; 2) What is the urgency of strengthening investigator regulation in cybercrime law enforcement? 3) How is the construction of the legal ratio of future arrangements to strengthen the authority of investigators in cybercrime law enforcement in Indonesia? The research method is a Normative Juridical research method (legal research) with the approaches used being a legislative approach, a conceptual approach, and a legal comparative approach. The conclusions of the results of this study are: 1) Law enforcement of cybercrime has not been carried out optimally because the police have not been able to take action related to global cybercrimes such as phishing, malware, ransomware attacks, and these types of cybercrimes not included in cybercrime as per the ITE Law; 2) The urgency of strengthening the regulation of investigators in the enforcement of cybercrime laws is very important to answer the challenges of information technology development, because cybercrime needs to be handled more quickly, accurately, and thoroughly to protect the national interest; 3) Construction of the legis ratio Strengthening the authority of investigators in law enforcement of cybercrimes in Indonesia is based on the need for a law that is adaptive to the dynamics of crime in cyberspace which is developing very quickly and complexly. Therefore, future regulations must be built with a legal paradigm that is responsive, clear, firm, and comprehensive regarding the authority of investigators in law enforcement of cybercrimes in Indonesia, and supported by institutional and technological infrastructure.

Keywords: Rasio Legis, Investigators, State Cyber and Cryptography Agency (BSSN), Law Enforcement, Cybercrime.